

Pengukuran Indeks Kualitas Pengelolaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Prespektif Masyarakat Sipil dan Masyarakat Bisnis

Basariah Sitorus

Jurusan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Batam, Batam 29861, email: basavute@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menghitung besarnya indeks kualitas pengelolaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). Responden sebanyak 19 sampel yang terdiri dari wartawan, masyarakat bisnis, Akademis dan LSM, hasil penelitian prespektif Masyarakat Sipil sebesar 5.09 (cukup) dan perspektif Masyarakat Bisnis sebesar 5.77 (cukup). Masyarakat menilai kualitas pengelolaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai bisa mengembangkan *good governance* dengan waktu, tenaga, anggaran dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: kualitas, pengelolaan pemerintah, MPE, Masyarakat Bisnis, Masyarakat Sipil.

Abstract - *This study aims to quantify the quality management of the government's index of Riau Islands province by using the Comparison Method of Exponential (MPE). Respondents were 19 samples consisting of journalists, business people, academic and NGOs, Civil Society research perspective for 5,09 (enough) and the Business Community perspectives of 5,77 (enough). People consider quality management Riau Islands Provincial Government has started to develop good governance with time, effort, budget and resources owned by the public and government.*

Keywords: capital quality, management of government, MPE, Community Business, Civil Society.

1. PENDAHULUAN

Di Era reformasi hingga saat ini perbincangan *good governance* selalu menjadi perbincangan menarik baik dari jajaran politisi, akademisi, birokrat masyarakat bisnis, masyarakat awam maupun kalangan mahasiswa. Dalam lingkungan masyarakat sekarang ini, isu-isu mengenai *good governance* seolah menjadi isu yang penting dibahas.

Undang – undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikannya keleluasaan atau hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundangan yang berlaku agar mampu memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu setiap daerah akan dipacu untuk terus memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahannya sehingga mencapai *Good Governance*. Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan perwujudan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional dimana masyarakat dapat dengan mudah dengan prosedur yang tidak panjang untuk menikmati pelayanan tersebut.

Tahun 2012, Indonesia Governance Indeks (IGI) dari Kemitraan sebuah lembaga yang melakukan riset berupa mengukur tingkat kinerja pemerintah dari arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat bisnis. Dari arena tersebut akan dilihat dari penentuan tujuan yang tepat, pengembangan standar yang dibutuhkan secara efektif dapat dilaksanakan dan dikembangkan serta operasi yang ekonomis dan efisiensi di daerah.

Pemerintah menurut kemitraan (2012) adalah arena “*Political Office*” yang eksistensinya lahir dari pilihan rakyat dengan kata lain, ia ditempatkan oleh rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan di Provinsi. Fungsi-fungsi fundamentalnya adalah pembuatan kerangka kebijakan yang menjawab kepentingan publik, penganggaran, koordinasi dan pengawasan pembangunan, sebagai contoh gubernur dan DPRD. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang memiliki peran maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, contoh Satuan Kerja Pembantu Daerah (Dispenda, Disnaker, dsb).

Masyarakat sipil memiliki fungsi advokasi dan fungsi pemberdayaan dalam kebijakan yang dibuat pemerintah, dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh Wojowasito, Guru Besar IKIP Malang, kata

advocate dalam bahasa Inggris diartikan menganjurkan, memajukan (*to promote*) dan menyokong. Masyarakat sipil adalah organisasi yang secara terorganisir dan sistematis melakukan perubahan yang berkaitan dengan sebuah kebijakan dengan segenap aktifitas pengerahan sumber daya yang ada, contoh masyarakat sipil seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Akademis dan Wartawan.

Masyarakat bisnis yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian. Kemitraan (2012) mendefinisikan Masyarakat bisnis adalah masyarakat yang menjalankan usaha yang berorientasi profit dan terlibat dalam menunjang kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, HIPMI, Kadin dan Gapensi.

Penelitian ini mengukur indeks kualitas pengelolaan pemerintah dengan menggunakan dua arena, yaitu masyarakat bisnis dan masyarakat sipil. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan dukungan dari masyarakat sipil dan pengaruh kebijakan tersebut terhadap perekonomian masyarakat bisnis sebagai penunjang dalam penyediaan barang dan jasa untuk kelancaran aktivitas pemerintahan. Perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya beranggapan empat arena (pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat bisnis) sangat terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan atau tata pemerintahan, penelitian sebelumnya mengelola data dengan menggunakan AHP (*Analytical Procedure Hierarchy*) dalam menghitung penilaian indeks tata kelola pemerintah. Sedangkan penelitian sekarang beranggapan arena masyarakat sipil dan masyarakat bisnis tersebut sangat berpengaruh terhadap penilaian kualitas tata kelola pemerintah karena sebagai stakeholder yang menjalankan dan memanfaatkan kebijakan yang dibuat pemerintah, peneliti juga lebih memilih menggunakan metode perbandingan eksponensial (MPE) karena memiliki keunggulan walau terlihat sangat sederhana, metode perbandingan eksponensial mempunyai keuntungan dalam mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam analisis. Nilai skor yang menggambarkan urutan prioritas menjadi besar (fungsi eksponensial) ini mengakibatkan urutan prioritas alternatif keputusan lebih nyata.

Penelitian ini mengukur melalui perspektif dari masyarakat bisnis dan masyarakat sipil untuk memberikan penilaian terhadap pengelolaan tata kelola pemerintah provinsi kepulauan Riau tahun 2011.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tata Kelola Pemerintah (*Governance*)

Menurut *World Bank* (1994), *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara kebijakan/regulasi maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Dwiyanto, et al (2007) Tata kelola pemerintah (*Governance*) sebagai pelaksanaan otoritas administratif, politik dan ekonomi untuk mengelola masalah suatu negara pada semua tingkat yang mencakup mekanisme, proses, dan lembaga ketika warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan, melakukan hak politiknya, memenuhi kewajibannya, dan mendiskusikan perbedaan di antara mereka.

Piere (2000) Tata Kelola (*Governance*) adalah sebuah sistem aturan, proses, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan yang berbeda, terutama berkaitan dengan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koherensi.

United Nations Development Programme (UNDP 1997 dalam Kuncoro, 2004) merumuskan istilah *Governance* sebagai suatu penyelenggaraan (*exercise*) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah – masalah sosialnya istilah. "*Governance*" menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan *kohesi, integrasi*, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Governance merupakan penilaian terhadap pihak yang menetapkan sebuah kebijakan dengan pihak yang menjalankan kebijakan tersebut dan keuntungan yang diperoleh kedua pihak.

2.2 Aren Tata Kelola (*Governance*)

Kemitraan (2012), masing-masing Arena dalam *good governance* memiliki peran sebagai berikut:

1. Pemerintah menurut Indonesia Governance Index adalah arena Jabatan Politik (*Political Office*) yang eksistensinya lahir dari pilihan rakyat dengan kata lain, ia ditempatkan oleh rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan di Provinsi. Fungsi-fungsi fundamentalnya adalah pembuatan kerangka kebijakan yang menjawab kepentingan publik, penganggaran, koordinasi dan pengawasan pembangunan.
2. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang memiliki peran maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan fungsi

utama pengumpulan pendapatan daerah (*Revenue Collection*), pelayanan publik dan pengaturan ekonomi daerah.

3. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. Dengan fungsi utama adalah advokasi kebijakan publik dan fungsi pemberdayaan.
4. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (*profit*). Dengan fungsi utama yang diukur adalah upaya perlindungan kepentingan seluruh komponen bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha.

Empat arena di atas memiliki peran masing-masing dalam tata kelola pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pengguna kebijakan (stakeholder).

2.3 Prinsip Tata Kelola Pemerintah

Setiap arena tata kelola pemerintah akan dihubungkan dengan prinsip tata kelola pemerintah. Menurut IGI (2012) prinsip-prinsip tata kelola (*Governance*) pemerintah yaitu:

1. Partisipasi: tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pembuat kebijakan dalam setiap arena dan sub-arena.
2. Keadilan: Kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi publik disetiap arena bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta responsive terhadap publik.
3. Transparansi: kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pejabat publik, lembaga non pemerintah serta lembaga bisnis disetiap arena dan sub arena terbuka kepada publik untuk memberi masukan, monitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses publik.
4. Efisiensi: kondisi dimana kebijakan dan program yang dijalankan telah menggunakan sumberdaya-manusia, keuangan dan waktu secara optimal.
5. Akuntabilitas: kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi publik di setiap arena bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta *responsive* terhadap publik.
6. Efektivitas: kondisi dimana tujuan kebijakan dan hasil program telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.5 Masyarakat Bisnis

Menurut Kemitraan (2012), Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (*profit*). Dengan fungsi utama yang diukur adalah upaya perlindungan

kepentingan seluruh komponen bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha.

Brown dan Petrello (1976) "*Business is an institution which produces goods and service demanded by people.*" Artinya bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.

Huat (1990) Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang & jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat (*bussiness is then simply a system that produces goods and service to satisfy the needs of our society*).

Masyarakat bisnis adalah lembaga yang memperoleh profit dari menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan mengaitkan usaha dengan proyek pemerintah.

2.6 Masyarakat Sipil

Kemitraan (2012), Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. Dengan fungsi utama adalah advokasi kebijakan publik dan fungsi pemberdayaan.

Wojowasito (1980) kata *advocate* dalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-macam. *Avocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis, dalam konteks advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik (umum) atau kepentingan anggota masyarakat.

Effendi (2008), Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.

2.7 Metode Perbandingan Eksponensial

Metode perbandingan eksponensial (MPE) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang mengkuantifikasikan pendapat seseorang atau lebih dalam skala tertentu. Pada prinsipnya ia merupakan metode skoring terhadap pilihan yang ada. Dengan perhitungan secara eksponensial, perbedaan nilai antar kriteria dapat dibedakan tergantung kepada kemampuan orang yang menilai (Maarif, 2003).

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria

jamak. Dalam menggunakan MPE ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu: menyusun alternatif-alternatif keputusan yang akan dipilih, menentukan kriteria atau perbandingan kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi, menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria, melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria, menghitung skor atau nilai total setiap alternatif, dan menentukan urutan prioritas keputusan didasarkan pada skor atau nilai total masing-masing alternatif (Marimin, 2004).

Riyatno (1999) menambahkan bahwa Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) digunakan sebagai pembantu bagi individu mengambil keputusan untuk menggunakan rancang bangun yang telah terdefinisi dengan baik tiap tahap proses. MPE digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif dengan menggunakan sejumlah kriteria yang ditentukan berdasarkan hasil survei dengan pakar terkait.

Manning (1984) melanjutkan bahwa tahapan dalam menggunakan metode perbandingan eksponensial adalah:

1. Menyusun alternatif keputusan yang akan dipilih.
2. Menentukan kriteria atau pertimbangan kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi
3. Menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria
4. Melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria
5. Menghitung nilai atau skor alternative
6. Menentukan urutan prioritas keputusan didasarkan kepada skor atau nilai total masing-masing alternatif.

Beberapa penelitian yang menggunakan MPE, seperti penelitian Subarkah. et. al., (2012) yang menggunakan metode perbandingan eksponensial (MPE) untuk membuat sistem pendukung keputusan pemberian reward kepada dosen, karena Bahwa dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial sistem yang dihasilkan menggambarkan nilai skor urutan prioritas menjadi besar yang mengakibatkan alternatif keputusan lebih nyata. Rinaldi (2008) analisis pengambilan keputusan menghasilkan prioritas keputusan untuk melakukan *outsourcing* dengan tiga (3) metode yaitu MPE, AHP dan CPI. Dengan *outsourcing*, perusahaan dapat menekan biaya produksi. Setyawan (2009) menganalisis pasokan sayuran unggulan di Desa Pasir Langu dengan menggunakan metode MPE.

2.8 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Berapa besar indeks kulaitas tata kelola Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011

perspektif Masyarakat Sipil dan Masyarakat Bisnis.

- b. Seberapa baik kualitas tata kelola pemerintah provinsi Kepulauan Riau perspektif Masyarakat Sipil dan Masarakat Bisnis.

2.9 Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian di kepulauan Riau dan memilih obyek perspektif masyarakat sipil dan masyarakat bisnis, sample yang ditetapkan mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kemitraan (2012). Sample *berupa Well Informed Person* (WIP) yaitu sampel/responden dengan pengetahuan sangat baik dan merupakan pihak yang benar-benar memahami dinamika *governance* ditingkat provinsi.

Data yang terkumpul dilakukan dengan cara mengundang WIP (responden) dalam acara workshop dan mengajak diskusi kepada responden yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2013 bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang, mulai pukul 09.00 s.d 15.00 WIB. Pengisian kuisoner/angket dilakukan sebelum pelaksanaan diskusi kelompok, responden yang diundang tidak semua dapat hadir waktu itu. Responden yang tidak hadir pada saat itu akan diwawancarai di kantor mereka seusai acara workshop tersebut, kuisoner yang tersebar sebanyak 20 buah dan hingga batas pengumpulan data hanya 19 buah kuisoner yang valid untuk diolah dan diteliti.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan pembobotan setiap pertanyaan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan (2012). Instrumen ini digunakan mengingat kemitraan juga melakukan penelitian yang sama pada tahun 2008. Setiap pertanyaan dari kuisoner merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip tata kelola (terlampir).

Pengolahan dan analisis data menggunakan metode perbandingan eksponensial dan analisis deskriptif. Metode perbandinga eksponensial digunakan untuk mengukur indeks kualitas pengolahan di Propinsi Kepulauan Riau. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai seberapa baik indeks tersebut, Dalam membangun indeks, ada rangkaian langkah yang harus dilalui. Langkah-langkah ini di lihat pada gambar di bawah.



Langkah Pembentukan Indeks

Pengukuran indeks kualitas pengelolaan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan metode perbandingan eksponensial (MPE). Teknik ini digunakan sebagai pembantu bagi individu pengambilan keputusan untuk menggunakan rancang bangun model yang terdefinisi dengan baik pada tahapan proses, yaitu:

1. Data mentah diperoleh dari pengumpulan kuisioner, kuisioner yang telah diisi akan direkap ke dalam format yang sama sehingga dapat dihitung perlakuan statistik yang diperlukan (transformasi data),
2. Nilai setiap pertanyaan akan ditotalkan, setelah itu akan diberi skor dengan mengambil rata – rata setiap pertanyaan,
3. Pemberian bobot untuk setiap pertanyaan (Q), untuk bobot sendiri menggunakan penelitian sebelumnya dari kemitraan (2012), kemitraan sepenuhnya mempercayakan pembobotan pada pendapat para ahli.

Beberapa metode penentuan bobot:

a. Langsung

Artinya pemberian bobot bersifat subjektif, disini pemberian bobot oleh seseorang dilakukan secara langsung tanpa melakukan perbandingan relatif terhadap kriteria lainnya. Biasanya dilakukan oleh orang yang mengerti, paham, dan berpengalaman dalam menghadapi masalah keputusan yang dihadapi.

b. Metode Eckenrode

Konsep ini adalah dengan melakukan perubahan urutan menjadi nilai, dimana:

Urutan 1 dengan tingkat (nilai) tertinggi

Urutan 2 dengan tingkat (nilai) di bawahnya, dan seterusnya.

- c. Peneliti memberikan peringkat (*Rank*) dari yang tertinggi hingga yang terendah untuk setiap bobot pertanyaan dari masing – masing perspektif masyarakat sipil dan masyarakat bisnis.
- d. Formulasi perhitungan MPE

$$\text{Total nilai (TN}_i) = \sum_{j=1}^m (RK_{ij})^{TKK_j}$$

TN_i = Total nilai alternatif ke-i

RK_{ij} = Derajat kepentingan relatif kriteria ke-j pada pilihan keputusan i

TKK_j = Derajat kepentingan kriteria keputusan ke-j; TKK_j > 0; bulat

j = Jumlah pilihan keputusan

m = Jumlah kriteria keputusan

i = 1,2,3,..., n; n = jumlah pilihan alternatif

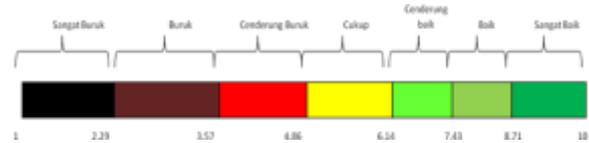
j = 1,2,3,..., m; m= jumlah kriteria

atau jumlah dari perkalian nilai rata – rata dengan peringkat

- e. Setelah nilai indeks diperoleh, selanjutnya nilai tersebut dinormalisasikan dengan nilai tertinggi mencapai sepuluh (10) dan nilai terendah satu (satu). Normalisasi dilakukan dengan proposional dengan patokan nilai indeks yang tertinggi atau:

$$\text{Normalisasi} = (\text{Nilai indeks setiap pertanyaan} * 10) / \text{Nilai indeks tertinggi}$$

setelah indeks tiap pertanyaan telah diukur dengan metode MPE, selanjutnya menilai seberapa baik hasil indeks tersebut dengan mengacu pada kriteria skala indeks di bawah.



Sumber data: kemitraan (2012)

Kriteria Skala Indeks

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengolahan Data

Pengolahan data dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Pengolahan data dapat dilihat pada lampiran 2 (Masyarakat Sipil) dan Lampiran (Masyarakat Bisnis).

Pembentukan indeks untuk penelitian ini diawali dengan mengolah data mentah, seperti yang diilustrasikan pada bab 3, data mentah yang dikumpulkan berupa kuisioner dari responden dan memastikan kuisioner tidak ada kesalahan dalam pengisian kuisioner. Data dimasukkan dalam format kolom seperti pada lampiran 2 da 3, setelah itu setiap pertanyaan diuji validitas dengan pengolahan statistik sederhana (*correlation*).

Hasil rekapan akan dirata-ratakan, hasil rata-rata kemudian dibobot dan hasil pembobotan *score* (*ranking*). Nilai pembobotan diambil dari kemitraan (2012). Dari ranking tersebut akan di perolah indeks dengan perkalian Ranging dengan rata-rata hasil kuisioner.

Hasil indeks akan dinormalkan dengan Nilai normal sebesar 10 untuk memudahkan membaca, karena dari hasil perhitungan pada lampiran 2 dan 3 hasil indeks masih membingungkan dalam membaca, penormalan pada baris indeks Normal. Normalisasi telah dijelaskan pada BAB III, dimana indeks tertinggi menjadi standar penentuan dengan indeks tertinggi dinormalkan sebesar 10.

Dari hasil pengolahan data menggunakan MPE diperoleh indeks untuk perspektif masyarakat sipil sebesar 5,09 dengan kriteria “cukup” dan perspektif

masyarakat bisnis sebesar 5,77 dengan kriteria “cukup”. Nilai tersebut diperoleh dari hasil rata – rata dari total indeks setiap pertanyaan yang mewakili prinsip – prinsip tata kelola pada pemerintahan

3.2 Analisis Data

Pengukuran indeks kualitas Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pengolahan data pada tabel 4.6 dan tabel 4.7, dengan menghubungkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintah dapat dilihat pada tabel 3.1 (perspektif masyarakat sipil) dan Tabel 3.2 (perspektif masyarakat bisnis) di bawah.

Tabel 3.1 menggambarkan indeks perspektif masyarakat sipil Provinsi Kepulauan Riau, dimana penerapan prinsip efektivitas dari arena masyarakat sipil hanya sebesar 2,28 (sangat buruk). Namun indeks tertinggi juga diperoleh arena masyarakat sipil dalam penerapan prinsip *fairnes* yaitu sebesar 6,85 (cenderung baik).

1. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi memiliki nilai indeks sebesar 5,91 dengan kriteria cukup, dengan begitu perspektif masyarakat sipil dalam hal menentukan kebijakan pemerintah provinsi kepulauan riau “cukup”, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam musrembang sudah terlibat walau dalam skala cukup, jadi masih harus diperluas lagi.

Tabel 3.1
Indeks tata kelola Pemerintahan Perspektif Masyarakat Sipil

ARENA CIVIL SOCIETY/ Masyarakat Sipil		Indeks Normal	Kriteria
1. Prinsip Partisipasi		5,91	
Q1	Wadah keterlibatan masyarakat yang disediakan oleh OMS untuk advokasi dan monitoring	1,82	Cukup
Q9	Pelibatan masyarakat oleh OMS dalam upaya pemberdayaan masyarakat.	10,00	
2. Prinsip Fairness		6,85	
Q2	Pengarusutamaan jender dan kelompok rentan dalam kegiatan advokasi dan monitoring OMS.	9,66	Cenderung Baik
Q4	Variasi / lingkup isu-isu yang diadvokasi dan dimonitoring OMS	4,03	
3. Prinsip Akuntabilitas		5,10	
Q3	Laporan program dan keuangan kelembagaan.	4,72	Cukup
Q10	Prosedur monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.	5,47	
4. Prinsip Transparansi		5,64	
Q5	Akses terhadap informasi kelembagaan dan kegiatan OMS	5,01	Cukup
Q11	Akses terhadap informasi program pemberdayaan masyarakat	6,26	
5. Prinsip Efisiensi		6,16	
Q6	Efisiensi kegiatan advokasi dan monitoring OMS.	7,48	Cenderung Baik
Q7	Koordinasi antar OMS dalam kegiatan advokasi dan monitoring.	4,83	
6. Prinsip Efektivitas		2,28	
Q8	Kontribusi OMS terhadap upaya pemberantasan korupsi.	0,86	Sangat Buruk
Q12	Kontribusi OMS terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	3,51	
Q13	Kontribusi OMS terhadap upaya pemberdayaan kelompok-kelompok rentan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/AIDS)	2,47	

2. Prinsip Keadilan (Fairnes)

Prinsip keadilan (*Fairnes*) memperoleh nilai indeks sebesar 6,85 dengan kriteria cenderung baik, hal ini didukung dengan tidak adanya diskriminasi dalam mengawasi dan memantau

perubahan yang terjadi di provinsi kepulauan riau dengan tidak membedakan *gender*.

3. Prinsip Akuntabilitas

indeks pada prinsip Akuntabilitas perspektif masyarakat sipil sebesar 5,10 dengan kriteria cukup, pandangan masyarakat sipil terhadap kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan kegiatan yang dilaksanakan kepada lembaga – lembaga yang berkepentingan. Indeks prinsip akuntabilitas yang disebabkan oleh dua indikator. Yaitu tidak adanya audit independen atas laporan keuangan LSM secara reguler dan kurang adanya keserasian antara program kerja LSM dengan prioritas masalah di provinsi Kepulauan Riau.

4. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi, memiliki indeks sebesar 5,64 dengan kriteria cukup, dengan begitu tata kelola pemerintah provinsi kepulauan riau sudah terbangunnya informasi yang bebas dan dapat diakses oleh lembaga – lembaga yang membutuhkan terutama masyarakat sipil dan masyarakat bisnis. Rendahnya indeks prinsip transparansi terjadi karena indikator-indikator seperti tidak adanya publikasi laporan keuangan LSM dan indikator tidak adanya akses publik terhadap laporan keuangan LSM di provinsi Kepulauan Riau.

5. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi yang cenderung baik seperti terlihat pada tabel 4.4.1 dengan nilai sebesar 6.16, digambarkan dengan anggaran yang tercapai sesuai tujuan dan program pemerintah dengan SDM, keuangan, dan waktu secara optimal. Salah satu program pemerintah yaitu program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. Sedangkan rendahnya indeks efisiensi disebabkan karena besarnya rasio biaya operasional LSM terhadap biaya program. Fenomena ini mengindikasikan bahwa LSM di provinsi Kepulauan Riau “sepi program kerja”.

6. Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas dengan nilai indeks sebesar 2.28 dengan kriteria sangat buruk dari prinsip – prinsip tata kelola Pemerintah Kepulauan Riau, efektivitas yang buruk menggambarkan kebijakan dan program pemerintah tidak tercapai dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena kurangnya mekanisme pengelolaan pemerintahan didesentralisaikan kepada otoritas yang makin dekat dengan rakyat.

Masyarakat sipil, hanya satu prinsip yang memperoleh kualifikasi sangat buruk. Sedangkan lima prinsip lainnya yaitu *fairness*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan efisiensi dalam kategori cukup dan cenderung baik. Rendahnya indeks prinsip *efektivitas* disebabkan oleh rendahnya nilai indikator tingkat diskriminasi isu dan sasaran lembaga swadaya

masyarakat dalam melakukan advokasi serta rendahnya nilai indikator tingkat diskriminasi media lokal dalam pemberitaan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa LSM dan media lokal cenderung diskriminatif dalam advokasi dan pemberitaan.

Tabel 3.2
Indeks tata kelola Pemerintahan Perspektif Masyarakat Bisnis

ARENA ECONOMIC SOCIETY/ Masyarakat Bisnis		Indek Normal	Kriteria
1. Prinsip Partisipasi		8,35	Baik
Q1	Kualitas partisipasi dalam wadah pengambilan keputusan asosiasi.	6,70	
Q2	Keterlibatan asosiasi bisnis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	10,00	
2. Prinsip Fairness		5,42	Cukup
Q3	Kesempatan yang sama bagi anggota asosiasi dalam mendapatkan informasi, fasilitas dan mengikuti tender/proyek	4,26	
Q7	Perhatian sektor usaha terhadap tuntutan kesejahteraan buruh	5,34	
Q14	Pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan oleh masyarakat ekonomi	6,67	
3. Prinsip Akuntabilitas		2,19	Sangat Buruk
Q4	Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan asosiasi bisnis	0,78	
Q9	Kepatuhan sektor usaha dalam membayar Pajak / retribusi	3,76	
Q10	Kepatuhan sektor usaha terhadap aturan dan prosedur pelaksanaan usaha	2,66	
Q12	Tanggung jawab dalam Pengelolaan CSR	1,56	
4. Prinsip Efisiensi		6,88	Cenderung Baik
Q11	Penggunaan energi dan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	4,08	
Q6	Koordinasi antar asosiasi usaha dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	9,68	
5. Transparansi		8,94	Sangat Baik
Q5	Keterbukaan dalam menjalankan fungsi implementasi proyek pemerintah.	8,94	
6. Prinsip Efektivitas		8,20	Baik
Q8	Kemampuan sektor usaha dalam menyelesaikan sengketa dengan masyarakat	7,62	
Q13	Kualitas Kemudahan berusaha dan iklim bisnis provinsi	8,78	

Tabel 4.6 menampilkan lima prinsip tata kelola pemerintah perspektif masyarakat bisnis, jika dilihat maka nampak separuh prinsip memiliki nilai indeks diatas 5 (lima), dan 2 (dua) lagi memiliki nilai indeks yang cukup. Prinsip akuntabilitas yang cenderung buruk sebesar 3.34 dan prinsip efisiensi yang memiliki nilai indeks sebesar 10 dengan kriteria sangat baik.

1. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi memiliki nilai indeks sebesar 8.35 dengan kriteria baik, Penetapan FTZ ternyata telah mengasah arena Masyarakat Ekonomi memiliki indeks partisipasi lebih baik.

2. Prinsip Keadilan (Fairnes)

Prinsip keadilan (*Fairnes*) memperoleh nilai indeks sebesar 5,42 dengan kriteria cukup, hal ini didukung dengan keadilan (*fairness*) dalam penegakan hukum terutama dalam penerapan Undang-undang *Free Trade Zone* masih rendah sehingga justru menghambat pertumbuhan kegiatan perekonomian di kawawan *Free Trade Zone (FTZ)*.

3. Prinsip Akuntabilitas

indeks pada prinsip Akuntabilitas perspektif masyarakat sipil sebesar 2,19 dengan kriteria

sangat buruk, pandangan masyarakat bisnis terhadap kewajiban untuk menjalankan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah terutama kawasan FTZ yang masih tidak jelas kemana dana tersebut disalurkan.

4. Prinsip Transparansi

Masyarakat bisnis pada prinsip transparansi memperoleh nilai indeks sebesar 8,49 dengan kriteria sangat baik, prinsip ini ternyata menjadi titik lemah semua arena Provinsi Kepulauan Riau. Publikasikan semua prosedur, dokumen, dan informasi yang menjadi indikator prinsip keterbukaan masing-masing arena di website institusi. Secara teknis mudah dilakukan, hanya mengunggah di website.

5. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi yang sangat baik seperti terlihat pada tabel 9 dengan nilai sebesar 6,88 dengan kriteria cenderung baik. Kemudahan berusaha merupakan kondisi dengan akses terbuka bagi seluruh masyarakat untuk berkegiatan ekonomi. Iklam ekonomi yang kondusif merupakan kondisi yang mendukung peningkatan produktivitas sektor ekonomi. indikator ini merupakan resultan dari penyediaan layanan publik dan perilaku pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas dengan nilai indeks sebesar 8.20 dengan Kriteria cenderung baik dari prinsip – prinsip tata kelola Pemerintah Kepulauan Riau, arena Masyarakat Ekonomi yang seharusnya bisa lebih efektif menyediakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata provinsi lain yang hampir semua tidak memiliki letak geografis yang strategis dan tidak menikmati fasilitas investasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, tumpang tindih peraturan dan ketidakpastian hukum dan peraturan di wilayah FTZ ditengarai telah menyebabkan belum maksimalnya pencapaian indikator kualitas kemudahan berusaha dan iklim bisnis Provinsi Kepulauan Riau.

Tata kelola ekonomi terdiri atas proses-proses yang mendukung aktivitas ekonomi dan transaksi ekonomi dengan cara melindungi hak-hak kepemilikan, menegakkan kontrak, dan mengambil langkah bersama dalam menyiapkan infrastruktur fisik dan organisasi yang sesuai. Proses-proses tersebut dilaksanakan pada kelembagaan-kelembagaan formal dan informal. Bidang tata kelola ekonomi mempelajari dan membandingkan kinerja berbagai kelembagaan yang berbeda pada berbagai kondisi yang berbeda, evolusi kelembagaan-kelembagaan tersebut, dan transisi dari satu set kelembagaan ke set kelembagaan yang lain Dixit (2001).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks kualitas pengelolaan pemerintahan provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,09 untuk masyarakat sipil dan 5,77 untuk masyarakat bisnis.
2. Kualitas pengelolaan pemerintah provinsi Kepulauan Riau tergolong “Cukup” untuk masyarakat sipil dan “Cukup” untuk masyarakat bisnis.

Hasil penilaian di atas arena masyarakat sipil yang harus menikmati kebijakan pemerintah dalam pelayanan dan kurangnya tersalur oleh yang membutuhkan. Masyarakat Ekonomi yang seharusnya bisa lebih efektif menyediakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata provinsi lain yang hampir semua tidak memiliki letak geografis yang strategis dan tidak menikmati fasilitas investasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. posisi geografis yang strategis secara perdagangan internasional, adanya insentif khusus berupa penetapan sebagai kawasan FTZ dengan berbagai fasilitas istimewa, dan motto Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertekad menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional ternyata belum membuahkan hasil yang semestinya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] admin. (2004, juli). *Deptan*. Retrieved Juli 2013, from <http://www.deptan.go.id/http://www.deptan.go.id/eplanning/admin/satlak/UU-33-tahun-2004.pdf>
- [2] Bakir; Zainab; Cris Manning. (1984). *Angkatan Kerja Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- [3] Brown R.D ; Petrello G.J. . (1976). *Introduction to Business, An Integration Approach* .
- [4] Hermalin; Benjamin E; Weisbach Michael S. Weisbach. (2003). (n. P. Review, Ed.) New York: Federal Reserve Bank of New York Eco.
- [5] Imam Subarkah; linda Atika; Susan Dian Purnamasari. (2012). *Sistem Informasi Pendukung Keputusan Pemberian Reward Kepada Dosen Menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial*.
- [6] Indonesia, T. P. (n.d.). *Governance Assessment*. (T. P. Indonesia, Editor) Retrieved Agustus 2013, from IGI: <http://www.kemitraan.or.id/igi/index.php/kerangka-kerja/metodologi>
- [7] Maarif, M. (2003). *Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- [8] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [9] P, Dasgupta; KG, Mäler. (1994). *Poverty, institutions and the environment resource base, World Bank Environment Paper No.9. , Worl Bank*.
- [10] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005*.
- [11] Pierre; Jon ; Guy Peters B. (2000). *Governance, Politics and The State. Governance, Politics and The State* .
- [12] Riant, D. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi* , 23.
- [13] Rinaldi, M. (2008). *Analisis Perbandingan Penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing Dan Non-Outsourche Pada Bagian Produksi Di PT Coca Cola Bottling Indonesia*. Skripsi, INSTITUT PERTANIAN BOGOR, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, Bogor.
- [14] Riyatno, B. (1999). *Dasar - dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Edisi ke Empat ed.). Yogyakarta: BPFE.
- [15] Setyawan, F. (2009). *Analisis Rantai Pasokan Sayuran Unggulan*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Departemen Manajemen, Bogor.
- [16] Taschereau ; Campos. (2003). *Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.
- [17] Wojowasito, Tito Wasito W. (1980). *Kamus Lengkap Inggris - indonesia Indonesi - Inggris*. Bandung: Hastasa.
- [18] World Bank. (1994). *World Development Report*. Washington DC: World Bank.